



NOTULEN RAPAT

Hari	: Rabu	Nomor Undangan Rapat
Tanggal	: 23 September 2026	B-1687/Un.02/DA/TU.00.02/09/2026
Waktu	: 09.00 - 11.00 WIB.	
Tempat	: Ruang Dekan Rapat Lt.2 Fakultas Adab dan Ilmu Budaya	
Agenda:	: Rapat Koordinasi Persiapan Penilaian PPID Pelaksana Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	

No.	Topik Pembahasan	Rencana Tindak Lanjut
1.	Pembukaan, sambutan dan arahan	Prof. Dr. Nurdin, S.Ag, S.S, MA. Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya <ul style="list-style-type: none">- Fakultas mengupayakan yang terbaik untuk penilaian oleh PPID.- Program ini menjadi hal-hal yang urgent bagi publik saat ini, berkaitan dengan itu maka perlu diselenggarakan program tersebut.- Semoga Fadib mendapatkan peringkat sesuai harapan.- Pada seluruh team diharapkan benar-benar bekerja sebaik mungkin dan bekerja keras untuk kesuksesan dan kebaikan bersama.
2.	Inti	<ul style="list-style-type: none">- WD II:<ul style="list-style-type: none">● SK sudah dibuat, atasan pelaksana Dekan Fadib dan seterusnya.● Monev terkait sosialisasi sudah mulai diperbaiki.●- PPID:<ul style="list-style-type: none">● PPID adalah hal yang sudah berlangsung setiap tahunnya.● UUD 14 2008 pelaksana terbuka penilaian sudah dimulai● 2010-2014 di UIN Sunan Kalijaga nilainya 0, karena tidak mengikuti penilaian.● Tahun 2025 didorong untuk terlibat dalam penilaian PPID ini.● Sebenarnya yang dinilai adalah tugas harian para pekerja/Staff UIN Sunan Kalijaga.● PPID yang dinilai adalah tugas-tugas yang sifatnya harian yang sudah terlaksana dan ternyata banyak yang belum terdokumentasikan,

		<p>maka perlu adanya didokumentasi agar dapat dinilai.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informasi daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan. Untuk yang public yang dapat diminta public dan harus diberikan. Contoh Dema meminta contoh kegiatan RAKKL mana yang harus diberikan. Batas pemberian informasi tetap ada, agar tidak semua data bisa diberikan, karena berkaitan dengan privasi, contoh data diri mahasiswa (alamat rumah, nomor, kk, ktp, dll). • Daftar informasi public: laporan keuangan, laporan-laporan kinerja. • Daftar informasi sifatnya serta-merta. Data ini berkaitan dengan hajat orang banyak. Contoh wisuda uin buat benner, dipublish di sosmed, dll. • Informasi yang tersedia setiap saat: dokumen yang tidak dipublish, tapi jika ada yang minta sudah ada. • Sepanjang informasi itu tidak dikecualikan, maka boleh diberikan. • Informasi yang dikecualikan: sifatnya umum, tapi dikecualikan dengan public yang tidak dipublikasikan. Contoh. Kasus pidana, informasi pelapor tidak boleh dibuka. Membahayakan prasarana penegak hukum. Data jika dibuka dapat menimbulkan permasalahan. • Peringatan data terkait HAKI harus diperhatikan dan jangan asal diberikan. • Jika bingung dapat dikonsultasikan pada team PPID terkait data yang bisa diberikan atau tidak. Intinya jika berkaitan dengan pribadi dan membahayakan, maka perlu hati-hati dan jangan diberikan. • Ijazah masuk dalam informasi public privasi, tapi boleh diberikan, semisal hal itu memang wajib di publish ketika menjadi pejabat. • Anggaran: perlu adanya pertimbangan untuk biaya yang dikeluarkan, misal pembelian alat transportasi coba dilihat dari urgensinya dan biaya yang sepatutnya. • Websit: PPID sudah ada, bagian informasi yang perlu diisi maka segera diisikan. • Kegiatan PPID di fakultas ada 2, yaitu penilaian dan defisit. • Dokumen informasi publik mudah diakses: cetak dan digital. • Tersedia layanan informasi online: permintaan atau permohonan, tidak harus langsung jawab
--	--	---

		<p>yag terpenting telah sampai dulu pada fakultas dan respon bisa disesuaikan bebannya. Jadi setiap hari tolong dibuka dan dilihat langsung diteruskan ke PPID.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruang PPID tidak harus ada di Lantai 1, yang terpenting diberikan informasi ruang PPID ada di lantai 3 (misalnya).
--	--	--

DOKUMENTASI



Mengetahui,
Pimpinan Rapat

Dr. Nurul Hak, M.Hum

Yogyakarta, 23 September 2026
Notulis,

Eva Femina